



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA SUDIRMAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUMAS DAN UMUM
3. NHK : 180008

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.184.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/22 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/80 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/56 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/48 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.500.000
5. Tanah Seluas 8.140 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 407.000.000
6. Tanah Seluas 6 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 246.047.027

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.630.047.027



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.630.047.027

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.